

MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH BPBD KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Melsha Natalia

NPP. 30.0924

Jl. Raya Bandung-Sumedang No. KM.20, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang
Jawa Barat 45363

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Fakultas Perlindungan Masyarakat

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor

Email: melshanatalia37@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Lalu Ahmad Murdhani, M.M

ABSTRACT

Problems Statement/Background (GAP): The highest number of forest fires was in 2021 where there were 20 forest and land fires, while the lowest was in 2020 with 13 times. Meanwhile in 2022 there were 16 forest and land fires up to December 12, 2022. **Porpuse:** The purpose of this study was to determine the mitigation of forest and land fires by BPDB in North Barito Regency, Central Kalimantan and to find out the problems faced in handling forest and land fire disaster mitigation in North Barito Regency. **Method:** This study uses qualitative methods using a descriptive analysis approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. **Result:** The results of research related to forest and land fire disaster mitigation by the BPBD of North Barito Regency can be concluded that the BPBD of North Barito Regency in carrying out its duties and responsibilities has been going well. However, forest and land fires still occur every year in the North Barito region. **Conclusion:** North Barito District BPBD is making efforts to reduce the risk of forest and land fires through mitigation efforts. By using a disaster mitigation strategy, BPBD is expected to be able to produce steps or strategies that are right on target in reducing the risk of forest and land fire disasters through mitigation efforts in North Barito Regency. The strategy carried out by the BPBD of North Barito Regency is using a mapping strategy, a mapping strategy, a strategy in information dissemination, a strategy in outreach and outreach, a strategy in education or training, and an early warning strategy. The internal problems faced by North Barito BPBD in mitigating forest and land fires are incomplete facilities and infrastructure, the budget from the central government cannot accommodate BPBD activities, and human resources whose competence is still uneven. The external problem faced is the lack of public awareness of the dangers of clearing land by burning.

Keywords: Forest and Land Fires, BPBD North Barito Regency, Central Kalimantan Province.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Jumlah kebakaran hutan tertinggi berada pada tahun 2021 terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 20 kali, sementara terendah pada tahun 2020 sebanyak 13 kali. Sementara itu pada tahun 2022 terjadi 16 kali kebakaran hutan dan lahan hingga pada tanggal 12 Desember 2022. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan oleh BPDB Di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah dan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam penanganan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian terkait dengan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD Kabupaten Barito Utara dapat disimpulkan BPBD Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sudah berjalan dengan baik. Namun, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi setiap tahunnya di wilayah Barito Utara. **Kesimpulan:** BPBD Kabupaten Barito Utara melakukan upaya agar dapat mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan melalui upaya mitigasi. Dengan menggunakan strategi mitigasi bencana, diharapkan BPBD mampu menghasilkan langkah atau strategi yang tepat sasaran dalam mengurangi resiko bencana kebakaran hutan dan lahan melalui upaya mitigasi di Kabupaten Barito Utara. Strategi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Barito Utara adalah menggunakan strategi pemetaan, strategi pemetaan, strategi dalam penyebaran informasi, strategi dalam sosialisasi dan penyuluhan, strategi dalam pendidikan atau pelatihan, serta strategi peringatan dini. Permasalahan internal yang dihadapi oleh BPBD Barito Utara dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan adalah sarana dan prasarana yang belum lengkap, anggaran dari pemerintah pusat tidak dapat mengakomodir kegiatan BPBD, dan sumber daya manusia yang masih belum merata kompetensinya. Pada permasalahan eksternal yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari membuka lahan dengan cara dibakar.

Kata kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan, BPBD Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang pada dasarnya memiliki banyak wilayah yang rentan terjadinya sebuah bencana. Dimana maksud dari bencana tersebut dapat berupa bencana alam maupun non alam. Peran pemerintah sangat dibutuhkan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap bencana di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang terpampang nyata pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Berdasarkan kutipan tersebut telah jelas bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak dasar yang merata tanpa memandang status ekonomi, sosial, serta budaya untuk terbebas dari rasa takut dan ancaman yang bisa saja terjadi. Hak masyarakat untuk merasa aman harus dijamin oleh pemerintah sekaligus mewujudkan tujuan bangsa Indonesia (Hazly, 2022).

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun faktor non alam maupun faktor manusia sehingga dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007).

Pulau Kalimantan adalah daerah yang memiliki kekayaan hutan yang besar di Indonesia, Kalimantan dengan luas mencapai 743.330 km² merupakan pulau terbesar nomor dua terluas di negara Indonesia namun hutan Kalimantan yang sangat luas dan rindang setiap tahunnya terancam kebakaran lahan dan hutan khususnya di kawasan Kalimantan Tengah setiap tahunnya mengalami kebakaran hutan.

Penanganan yang dilakukan pemerintah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan didominasi oleh penanganan yang sifatnya represif, seperti pemadaman dan penegakan hukum. Jika melihat penyebab kebakaran hutan dan lahan seperti dikemukakan di atas, kebijakan yang diterapkan selama ini baru sebatas mengatasi masalah pembukaan lahan yang dilakukan dengan pembakaran. Sementara itu, penyebab lain seperti konversi lahan, aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan lahan gambut, sengketa lahan belum tersentuh dalam kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Ifrani, 2018).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara memanfaatkan konsep dari manajemen bencana mulai dari tahap sebelum terjadi bencana yang diupayakan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan, saat terjadi bencana melalui tanggap darurat, dan setelah bencana melalui pemulihan dan rekonstruksi.

Penanganan yang dilakukan pemerintah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan didominasi oleh penanganan yang sifatnya represif, seperti pemadaman dan penegakan hukum. Jika melihat penyebab kebakaran hutan dan lahan seperti dikemukakan di atas, kebijakan yang diterapkan selama ini baru sebatas mengatasi masalah pembukaan lahan yang dilakukan dengan pembakaran. Sementara itu, penyebab lain seperti konversi lahan, aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan lahan gambut, sengketa lahan belum tersentuh dalam kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan manusia dalam rangka membuka lahan, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan ditunjang oleh adanya fenomena alam *El Niño Southern Oscillation* (ENSO) yang menimbulkan kekeringan. Kebakaran hutan menimbulkan berbagai dampak kesehatan dan sosioekonomi. Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dapat mengganggu negara-negara tetangga sehingga berpotensi mengganggu hubungan kenegaraan Indonesia dengan negara-negara tetangga tersebut. Daerah di Indonesia yang rawan kebakaran hutan dan lahan terutama di Pulau Sumatra dan Kalimantan yang memiliki areal perkebunan dan pertanian dalam skala besar serta beberapa kabupaten/kota diantaranya di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Jawa (BNPB, 2010).

Pulau Kalimantan yang memiliki julukan “Paru-Paru Dunia” dengan luas hutan sekitar 40,8 juta hektar menjadi korban oleh lalapan api setiap tahunnya baik yang terjadi secara alami karena kekeringan maupun oleh manusia itu sendiri.

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia BNPB dapat diketahui kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami fluktuatif. Jumlah kebakaran hutan tertinggi berada pada tahun 2021 terjadi kebakaran hutan dan lahan sebanyak 20 kali, sementara terendah pada tahun 2020 sebanyak 13 kali. Sementara itu pada tahun 2022 terjadi 16 kali kebakaran hutan dan lahan hingga pada tanggal 12 Desember 2022.

Selain Kotawaringin Barat yang menyumbang angka kebakaran hutan dan lahan tertinggi, adapula Kabupaten Barito Utara yang memiliki frekuensi kebakaran cukup tinggi. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tiap tahun di Kalimantan bagian Tengah kabupaten Barito Utara disebabkan oleh beberapa faktor seperti pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat atau perusahaan, maupun disebabkan karena memasuki musim kemarau serta karena ketidaksiapan masyarakat contohnya puntung rokok yang dibuang sembarangan dipinggir jalan yang menyebabkan kebakaran besar dan sulit

dipadamkan mengakibatkan banyak dampak yaitu, hilangnya habitat makhluk hidup di hutan, Kesehatan terganggu, perekonomian terganggu, terbatasnya bahan pangan, tumbangnya pohon besar, dan kerusakan lingkungan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu mengenai mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan maupun atau penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian Dwi Suci Jayanti berjudul *Peran Bpbd Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan* (Jayanti, 2022), menemukan bahwa Peran BPBD dalam mitigasi bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk pegawai yang memegang jabatan struktural cukup memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka dalam melaksanakan peran mereka yang menjadi bagian dari BPBD Kabupaten Tanah Laut namun perlu penyediaan SDM yang ahli dan berkompeten dalam mitigasi bencana. Hambatan yang berasal dari luar maupun dalam juga sudah dapat diatasi dengan upaya yang dilakukan dan didukung juga oleh beberapa faktor pendukung. Penelitian Aulia Rahman berjudul *Metode Restorasi Gambut Dalam Konteks Mitigasi Bencana kebakaran Lahan Gambut Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Rahman dan Yuliani, 2018), menemukan bahwa Kegiatan Restorasi yang berkaitan dengan mitigasi bencana, dapat dimulai melalui penanaman kembali hutan dan lahan gambut yang terdampak dengan tanaman-tanaman semusim (pada umumnya hortikultura) dan disandingkan dengan tanaman pohon yang dapat mengurangi kuantitas karbon atau mampu menyerap karbon serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, pembangunan lahan penampung air dalam kubah gambut yang berfungsi sebagai sumber pembasahan lahan gambut, dapat dimanfaatkan untuk perikanan darat oleh masyarakat setempat. Penelitian Ahmad Wahyudi berjudul *Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur)* (Wahyudi, 2022), menemukan bahwa mitigasi bencana dapat diartikan sebagai serangkaian upaya dan usaha demi berlangsungnya kebijakan pembangunan yang mempunyai resiko timbulnya bencana. Dalam upaya pencegahan bertujuan untuk mengurangi dampak kebakaran hutan karena upaya ini relatif lebih mudah dan murah daripada harus mengatasi dampak setelah kebakaran itu terjadi. Penelitian Tri Anggraini berjudul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kabupaten Musi Banyuasin* (Anggraini dan Agustina, 2021), menemukan bahwa BPBD Kabupaten Musi Banyuasin berperan sesuai dengan fungsi dan kewajibannya sebagai BPBD daerah yaitu sebagai organisasi yang melakukan kajian resiko Kawasan rawan kebakaran Karhutla di Kabupaten Musi Banyuasin. Kajian resiko Kawasan dilakukan dengan tiga tahapan utama yaitu menetapkan kondisi daerah, menetapkan kondisi lahan melalui tingkat kerawanan dan titik panas, dan terakhir adalah menginformasi kondisi kepada pemerintah daerah dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Penelitian Sri Heryati berjudul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana* (Heryati, 2021), menemukan bahwa pemerintah dapat menunjukkan perannya dalam penanggulangan bencana melalui 5 (lima) aspek, yaitu aspek legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, serta pengembangan kapasitas. Dalam hal ini, pemerintah telah mengambil langkah strategis guna mengatasi risiko dan dampak bencana alam melalui pembentukan BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah. Lembaga non-departemen tersebut menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Diketahui pula bahwa hampir setiap daerah menghadapi hambatan yang sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu masalah keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana-prasarana, serta lemahnya koordinasi antar sektor.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh BPBD daerah maupun pusat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan strategi mitigasi bencana, dan diharapkan BPBD mampu menghasilkan langkah atau strategi yang tepat sasaran dalam mengurangi resiko bencana kebakaran hutan dan lahan melalui upaya mitigasi di Kabupaten Barito Utara, adapun strategi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Barito Utara adalah menggunakan strategi pemetaan, strategi pemetaan, strategi dalam penyebaran informasi, strategi dalam sosialisasi dan penyuluhan, strategi dalam pendidikan atau pelatihan, serta strategi peringatan dini, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi juga berbeda dengan penelitian Dwi Suci Jayanti, Aulia Rahman, Ahmad Wahyudi, Sri Heryati, dan Tri Anggraini. Selain itu pengukuran/dimensi yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan konsep dari peraturan daerah kabupaten Barito Utara nomor 6 tahun 2014 karena berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dimensi yang ingin dicapai oleh peneliti adalah terwujudnya salah satu tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Utara yaitu Pemetaan, Pemantauan, Penyebaran Informasi, Sosialisasi dan Penyuluhan, Pelatihan dan Pendidikan, dan Peringatan Dini.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD Di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah dan Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam penanganan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan pemaparan terhadap fenomena ataupun gambaran situasi yang berdasarkan data-data yang ada. Kemudian diteruskan dengan melakukan interpretasi sebagai alur untuk menjelaskan dan menganalisis pada faktor-faktor tertentu terhadap masalah yang diteliti dan berakhir berusaha memprediksikannya.

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala BPBD Kabupaten Barito Utara, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Logistik yang masing-masing 1 orang/ responden, Tokoh masyarakat Kabupaten Barito Utara, dan Masyarakat Kawasan Kabupaten Barito Utara sebanyak 2 orang/ responden. Adapun alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan menguji informan dengan menggunakan pertanyaan agar mudah untuk dibuat. Pada saat di lapangan peneliti mempunyai hak untuk mengembangkan instrumen penelitian yang dibutuhkan. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman, (2018) yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan yang terakhir Penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Utara

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun terjadi di wilayah Kabupaten Barito Utara. Hal ini dapat diketahui ketika musim kemarau tiba, terdapat penyebaran titik panas atau *hotspot* yang ditemukan oleh BPBD Kabupaten Barito Utara. Salah satu penyebabnya adalah kegiatan masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar lahan. Hal tersebut dilakukan karena mudah dilakukan dan dapat menghemat biaya dibandingkan dengan cara yang dianjurkan pemerintah dalam hal pembukaan lahan. Berikut ini rekapitulasi bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten Barito Utara tahun 2022.

Tabel 1.

Rekapitulasi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

No	Kecamatan	Hotspot	Karhutla	Luas Bencana Karhutla	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Montallat	11	-	-	-
2	Gunung Timang	3	-	-	-
3	Gunung Purei	63	4	2,5 Ha	Luas Karhutla Terkonfirmasi
4	Teweh Timur	9	1	3 Ha	Luas Karhutla Terkonfirmasi
5	Teweh Tengah	12	-	-	-
6	Teweh Baru	1	-	-	-
7	Teweh Selatan	4	2	2,3 Ha	Luas Karhutla Terkonfirmasi
8	Lahei	54	5	9 Ha	Luas Karhutla Terkonfirmasi Sebagian
9	Lahei Barat	47	3	4,6 Ha	Luas Karhutla Terkonfirmasi Sebagian
Jumlah		207 kali	19 kali	15,9 Ha	

Sumber: BPBD Kabupaten Barito Utara, 2022

Berdasarkan tabel 1. diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Lahei dengan jumlah kebakaran hutan dan lahan paling tinggi dibandingkan Kecamatan lainnya selama tahun 2022 sebanyak 5 kali dengan total luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 9Ha.

3.2 Strategi Badan Penanggulangan Bencana dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Utara

3.2.1 Strategi Pemetaan

Strategi pemetaan merupakan strategi yang mengandalkan citra satelit untuk memotret keseluruhan wilayah yang diinterpretasikan melalui gambar agar mudah untuk melakukan pemantauan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan dengan berpedoman pada Perda Kabupaten Barito Utara nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

3.2.2 Strategi Pemantauan

Strategi pemantauan merupakan lanjutan dari strategi pemetaan. Strategi ini dipermudah dengan adanya peta rawan bencana yang memudahkan pemantauan oleh BPBD Kabupaten Barito Utara. Pemantauan yang dilakukan meliputi medan yang terdapat di Kawasan tersebut, jarak dari pemukiman ke hutan, perubahan arah angin dan sarana prasarana yang terdapat di suatu daerah.

3.2.3 Strategi Penyampaian Informasi

Informasi yang diberikan perlu keakuratan dan kecepatan penerimaan informasi tersebut serta metode penyampaian informasi juga perlu dilakukan dengan tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman informasi yang didapat oleh masyarakat Kabupaten Barito Utara. Masyarakat sebagai objek utama dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan perlu mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat. Terlebih bagi masyarakat yang tinggal berbatasan dengan hutan, mereka sangat mengandalkan informasi dari BPBD.

3.2.4 Strategi Sosialisasi dan Penyuluhan

Kabupaten Barito Utara merupakan daerah yang setiap tahunnya selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat perlu menyadari bahaya yang timbul dari kebakaran hutan dan lahan. BPBD sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengenai bencana alam sudah seyogyanya melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat dengan datang langsung ke daerah pemukiman yang berbatasan langsung dengan hutan. Dan memberitahukan mengenai hal yang perlu dan jangan dilakukan ketika terjadi kebakaran hutan, juga menginfokan berita-berita terbaru mengenai kawasan yang rawan kebakaran kepada masyarakat.

3.2.5 Strategi Pelatihan atau Pendidikan

Upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD Kabupaten Barito Utara selanjutnya adalah dengan dengan strategi pelatihan pendidikan. Melalui strategi pelatihan dan pendidikan, masyarakat semakin sadar akan bahaya dan cara penanggulangan dari kebakaran hutan dan lahan.

3.2.6 Strategi Peringatan Dini

Peringatan dini merupakan upaya preventif lainnya dari BPBD Kabupaten Barito Utara dalam hal mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Kabupaten Barito Utara setiap tahunnya. Peringatan dini dapat berupa sirine, *broadcast message* melalui aplikasi, dan *breaking news* melalui media elektronik. Strategi peringatan dini ini merupakan upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Barito Utara.

3.3 Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Penanganan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Barito Utara

Dalam melakukan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Utara, BPBD tidak selalu sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Permasalahan dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal. Faktor internal perlu menjadi perhatian agar kinerja dari BPBD Kabupaten Barito Utara menjadi optimal. Selain itu faktor eksternal juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Barito Utara dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Kesadaran masyarakat akan bahaya yang dapat timbul dari membuka lahan dengan cara dibakar selalu diabaikan dengan alasan efisien dan murah. Salah satu kendala BPBD dalam mitigasi bencana yaitu sulitnya lokasi rawan bencana kebakaran hutan dan lahan untuk dijangkau BPBD. Karena di Kabupaten Barito

Utara infrastruktur menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sehingga anggota kami tidak dapat melewatinya dengan mudah.

Namun hasil penelitian dari Tri Anggraini dan Dimas Agustian (2022), dan Sri Heryati (2020) berbeda yaitu

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Dwi Suci Jayanti (2022), Aulia Rahman dan Febri Yuliani (2018), Ahmad Wahyudi (2022), Tri Anggraini dan Dimas Agustian (2022), dan Sri Heryati (2020). Karena hasil penelitian ini ditumekan beberapa strategi yang dilakukan dalam Mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah yaitu strategi pemetaan, strategi pemantauan, strategi penyampaian informasi, strategi sosialisasi dan penyuluhan, strategi pelatihan atau pendidikan, dan strategi peringatan dini.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Suci Jayanti (2022) dengan judul penelitian *Peran Bpbd Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan*, yang dilakukan oleh BPBD dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan menggunakan beberapa kegiatan seperti program-program yang dilakukan oleh BPBD, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, dan Penindakan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahman dan Febri Yuliani (2018) dengan judul penelitian *Metode Restorasi Gambut Dalam Konteks Mitigasi Bencana kebakaran Lahan Gambut Dan Pemberdayaan Masyarakat*, penelitian ini merupakan sebuah studi pustaka yang mendeskripsikan bagaimana metode restorasi memiliki kaitan dengan proses mitigasi bencana kebakaran lahan gambut dan bagaimana metode restorasi dapat memberdayakan masyarakat lokal. Ada 5 langkah dalam merestorasi gambut yaitu: 1) memetakan gambut, 2) menentukan jenis, pelaku, dan rentang waktu pelaksanaan restorasi, 3) membasahi gambut (*rewetting*), 4) menanam lahan gambut (*revegetasi*), dan 5) memberdayakan masyarakat lokal.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Heryati (2020) dengan judul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*, adapun hasil temuan dalam penelitian ini diketahui bahwa pemerintah dapat menunjukkan perannya dalam penanggulangan bencana melalui 5 (lima) aspek, yaitu aspek legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, serta pengembangan kapasitas.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sudah berjalan dengan baik. Namun, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi setiap tahunnya di wilayah Barito Utara. Maka dari itu, diperlukan upaya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar dapat mengurangi resiko dari kejadian tersebut melalui upaya mitigasi. Dengan menggunakan strategi mitigasi bencana, diharapkan BPBD mampu menghasilkan langkah atau strategi yang tepat sasaran dalam mengurangi resiko bencana kebakaran hutan dan lahan melalui upaya mitigasi di Kabupaten Barito Utara. Permasalahan internal yang dihadapi oleh BPBD Barito Utara dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan adalah sarana dan prasarana yang belum lengkap, anggaran dari pemerintah pusat tidak dapat mengakomodir kegiatan BPBD, dan sumber daya manusia yang masih belum merata kompetensinya. Pada permasalahan eksternal yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari membuka lahan dengan cara dibakar, dan masalah infrastruktur yang tidak memadai sehingga sulit untuk dijangkau.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni menggunakan jumlah sampel yang sedikit dan hanya terbatas di ruang lingkup BPBD.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Barito Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Buku:

BNPB. (2010). *“Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2010-2014”*. Jakarta.

Creswell. (2017). *“Research Design pendekatan metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ifrani, I., & Amrin, A. (2018). *“Pengendalian Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan”* (Laporan Akhir, Naskah Akademik, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala).

Jayanti, D. S. (2022). *“Peran BPBD Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan”* (Doctoral dissertation, IPDN JATINANGOR).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *“Qualitative data analysis: A methods sourcebook”*. Sage publications.

Noor, D. (2014). *“Pengantar Mitigasi Bencana Geologi”*. Deepublish.

Simangunsong, Fernandes. (2017). *“Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik- Legalistik- Empirik-Inovatif”*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. Bandung: Alfabeta, CV.

Jurnal:

Heryati, S. (2020). *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana”*. Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP), 139-146.

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon. (2020). *“Sosialisasi Mitigasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon”*. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 7(1), 1-17.

Province, I. J. (2018) “*Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi*”. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Vol. 1 No. 2.

Putra, Z., & Muzakir, M. (2022). “*Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Administrasi di Kantor Desa: Studi Komparasi Menggunakan Uji One Way Anova dan Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat*”. Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen, 6(2).

Rahmat, H. K., & Alawiyah, D. (2020). “*Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam*”. Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, 6(1), 34-44.

Peraturan:

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana, (2006).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana, (2007).

